



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : AUDIT INTERNAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SARJONO**
2. Jabatan : **VICE PRESIDENT**
3. NHK : **54389**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **3.312.500.000**

1. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, WARISAN Rp. 125.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/45 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 627.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/45 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 617.500.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 63 m2/42 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000
5. Tanah Seluas 119 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 892.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **186.119.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOBIL, CHEVROLET CAPTIVA JEEP Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 32.619.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **84.363.218**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **235.056.856**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	30.000.000
Sub Total	Rp.	3.848.039.074
III. HUTANG	Rp.	274.999.619
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.573.039.455

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)
UNIT KERJA : SEKRETARIS KORPORASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YOSDIAN ADI PRAMONO
2. Jabatan : VICE PRESIDENT
3. NHK : 215900

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.950.000.000
1. Tanah Seluas 390 m2 di KAB / KOTA MALANG, WARISAN Rp. 700.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/135 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	498.000.000
1. MOBIL, BMW 318I Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 16.500.000		
3. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2017, LAINNYA Rp. 325.000.000		
4. MOTOR, PIAGIO SPRINT 150 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 56.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	24.022.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	27.957.118
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.499.979.118
III. HUTANG	Rp.	1.088.638.500
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.411.340.618

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD

LEMBAGA : PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)

UNIT KERJA : PT RAJAWALI TANJUNGSARI ENJINIRING

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YASSIR ISMAIL
2. Jabatan : KOMISARIS UTAMA
3. NHK : 854848

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 516.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER - Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 490.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 50.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 470.000.000

Sub Total Rp. 2.736.000.000

III. HUTANG Rp. 611.761.416

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.124.238.584

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.